

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki banyak perkembangan penduduk terus meningkat setiap tahunnya menjadi isu krusial yang berdampak signifikan pada berbagai aspek, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menuntut upaya peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan keluarga agar tercipta menjadi lebih baik.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia membawa dampak terbatasnya lapangan pekerjaan, tingginya angka pengangguran, dan potensi kekurangan bahan pangan. Mengatasi populasi yang besar ini bukanlah hal mudah. Dengan demikian, diperlukan tindakan yang serius dari pemerintah guna menekan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia, salah satunya melalui kebijakan-kebijakan strategis yang telah dirancang dan diimplementasikan (Rompis et al., 2022).

Kemiskinan adalah kondisi yang mencerminkan ketidakmampuan individu dalam mencukupi kebutuhan dasar kehidupan, terutama terkait konsumsi dan pendapatan. Masalah ini bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas generasi, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Guna mendukung keberhasilan program percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan adanya komitmen politik yang kuat (Rejekiningsih, 2011).

Kemiskinan datang apabila orang atau kelompok kelompok belum mampu mencapai kesejahteraan ekonomi sesuai dengan standar minimum untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut Chambers dalam Suryawati (2005),

Dalam makna yang sempit, kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketika seseorang tidak mempunyai uang maupun barang dalam pemenuhan kebutuhan pokok demi mempertahankan hidup. Namun, kemiskinan bukan hal terbatas pada aspek ekonomi, melainkan merupakan kondisi multidimensional yang mencakup lima aspek utama. Aspek-aspek tersebut meliputi: (1) kekurangan secara ekonomi atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar secara layak, (2) ketidakmampuan individu untuk mengambil keputusan atau bertindak secara mandiri, (3) kerentanan terhadap situasi krisis atau keadaan darurat, (4) ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pihaklain, serta (5) keterisolasian baik secara geografis (wilayah terpencil) maupun sosial (terpinggirkan dari komunitas atau akses layanan). Penjelasan ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan materi, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial dan psikologis yang memengaruhi kualitas hidup seseorang secara keseluruhan.

Kemiskinan merupakan isu yang bersifat multidimensional dan kompleks karena memiliki pengaruh dari berbagai faktor yaitu penghasilan, kesehatan, pendidikan, barang jasa, lokasi geografis, perbedaan gender, serta tempat tinggal. Secara garis besar, kemiskinan menggambarkan individu atau kelompok, laki-laki ataupun perempuan, mengalami ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok yang esensial untuk menjalani kehidupan yang manusiawi dan penuh martabat.. Pandangan ini bersumber dari pendekatan berbasis hak asasi manusia, yang menekankan bahwa setiap individu yang hidup dalam kemiskinan tetap memiliki hak dasar dengan masyarakat (Ustama, 2009).

Pandangan mengenai kemiskinan bukan hanya dipahami bentuk ketidakmampuan dari sisi ekonomi, melainkan mencerminkan kegagalan menjamin

terpenuhinya hak individu serta mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap kehidupan yang layak dan bermartabat. Hak-hak dasar tersebut meliputi akses terhadap kebutuhan esensial seperti makanan, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal yang memadai, air bersih, hak atas tanah, lingkungan yang sehat, perlindungan dari kekerasan maupun ancaman, serta kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, terhadap perempuan atau laki-laki (Mahsunah, 2022).

Tingkat kemiskinan pada setiap provinsi di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Salah satu wilayah menjadi perhatian adalah Provinsi Jawa Timur, mempunyai kemiskinan relatif tinggi daripada dengan provinsi lainnya. Secara umum setiap provinsi telah mempunyai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan antarprovinsi antara lain adalah laju pertumbuhan penduduk yang cepat, ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas pembangunan manusia, serta disparitas dalam distribusi pendapatan. Berikut ini tabel data mengenai kemiskinan setiap provinsi.

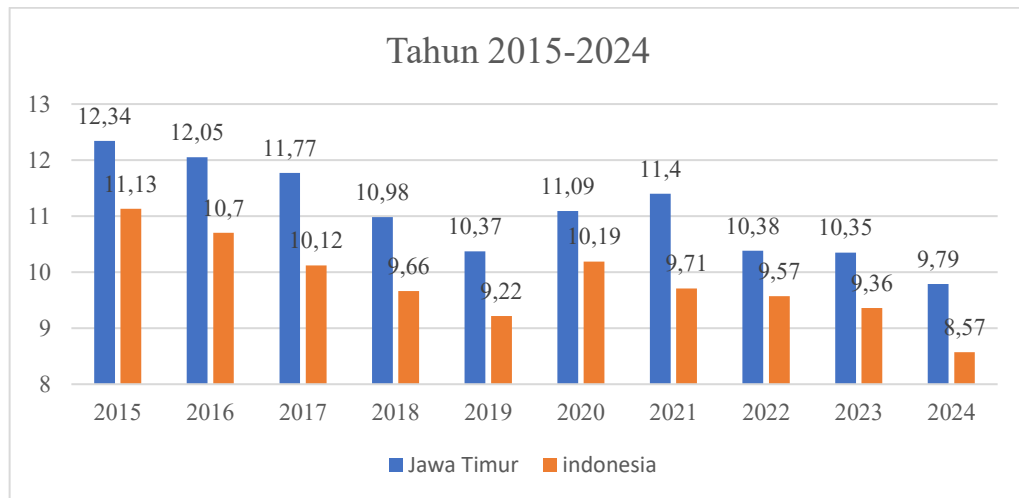
Tabel 1. Persentase Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2024

Provinsi	Persentase
Aceh	12,64
Sumatera Utara	7,19
Sumatera Barat	5,42
Riau	6,36
Jambi	7,26
Sumatera Selatan	10,51
Bengkulu	12,52
Lampung	10,62
Kepulauan Bangka Belitung	5,08
Kepulauan Riau	4,78
DKI Jakarta	4,14

Provinsi	Persentase
Jawa Barat	7,08
Jawa Tengah	9,58
DI. Yogyakarta	10,4
Jawa Timur	9,56
Banten	5,7
Bali	3,8
Nusa Tenggara Barat	11,91
Nusa Tenggara Timur	19,02
Kalimantan Barat	6,25
Kalimantan Tengah	5,26
Kalimantan Selatan	4,02
Kalimantan Timur	5,51
Kalimantan Utara	5,38
Sulawesi Utara	6,7
Sulawesi Tengah	11,04
Sulawesi Selatan	7,77
Sulawesi Tenggara	10,63
Gorontalo	13,87
Sulawesi Barat	10,71
Maluku	15,78
Maluku Utara	6,03
Papua Barat	21,09
Papua	18,09
Indonesia	8,57

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Tingkat kemiskinan sebuah permasalahan yang mendapatkan perhatian utama. Persentase kemiskinan tinggi di Provinsi Jawa Timur menggambarkan daerah tersebut masih menghadapi tantangan serius terkait tingginya jumlah penduduk miskin, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan data pada Tabel 1 tahun 2024, tercatat bahwa persentase penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 9,56%. Beberapa faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi tingkat kemiskinan antara lain adalah laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), serta besaran upah minimum provinsi maupun kabupaten.



Sumber: (BPS, 2024) Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional (Data Diolah)

Gambar 1. Perbandingan Persentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Tingkat kemiskinan menunjukkan perubahan cukup dinamis sepanjang periode 2015 hingga 2024. Berdasarkan ilustrasi di atas, 2015 jumlah penduduk miskin tercatat 12,34%. Seiring berjalannya waktu, angka tersebut mengalami penurunan secara bertahap hingga tahun 2019, yang dipengaruhi oleh berbagai program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah. Namun, pada tahun 2020, pandemi Covid-19 memicu kenaikan kembali angka kemiskinan hingga mencapai 11,09%. Tahun 2022, terjadi penurunan 10,38%, hingga mencapai 9,79% pada tahun 2024, yang menjadi tingkat kemiskinan terendah sepanjang Sejarah.

Tingginya kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015 sampai 2024 menunjukkan bahwa upaya penanganan kemiskinan oleh pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Pemerintah Jawa Timur perlu meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat agar persoalan kemiskinan dapat ditangani secara lebih efektif dan menyeluruh. Diperlukan kebijakan yang

bersifat komprehensif dan terintegrasi guna menurunkan angka kemiskinan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota, dan dari jumlah tersebut, terdapat 17 kabupaten dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi.

Tabel 2. Persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kab/Kota	Jawa Timur Tahun 2015-2024 (Persen)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pacitan	16,68	15,49	15,42	14,19	13,67	14,54	15,11	13,8	13,65	13,08
Ponorogo	11,91	11,75	11,39	10,36	9,64	9,95	10,26	9,32	9,53	9,11
Trenggalek	13,39	13,24	12,96	12,02	10,98	11,62	12,14	10,96	10,63	10,5
Tulungagung	8,57	8,23	8,04	7,27	6,74	7,33	7,51	6,71	6,53	6,28
Blitar	9,97	9,88	9,8	9,72	8,94	9,33	9,65	8,71	8,69	8,16
Kediri	12,91	12,72	12,25	11,31	10,42	11,4	11,64	10,65	10,72	9,95
Malang	11,53	11,49	11,04	10,37	9,47	10,15	10,5	9,55	9,45	8,98
Lumajang	11,52	11,22	10,87	9,98	9,49	9,83	10,05	9,06	8,93	8,65
Jember	11,22	10,97	11	9,98	9,25	10,09	10,41	9,39	9,51	9,01
Banyuwangi	9,17	8,79	8,64	7,8	7,52	8,06	8,07	7,51	7,34	6,54
Bondowoso	14,96	15	14,54	14,39	13,33	14,17	14,73	13,47	13,34	12,6
Situbondo	13,63	13,34	13,05	11,82	11,2	12,22	12,63	11,78	11,9	11,51
Probolinggo	20,82	20,98	20,52	18,71	17,76	18,61	18,91	17,12	17,19	16,45
Pasuruan	10,72	10,57	10,34	9,45	8,68	9,26	9,7	8,96	9,24	8,63
Sidoarjo	6,44	6,39	6,23	5,69	5,32	5,59	5,93	5,36	5	4,53
Mojokerto	10,57	10,61	10,19	10,08	9,75	10,57	10,62	9,71	9,8	9,37
Jombang	10,79	10,7	10,48	9,56	9,22	9,94	10	9,04	9,15	8,6
Nganjuk	12,69	12,25	11,98	12,11	11,24	11,62	11,85	10,7	10,89	10,17
Madiun	12,54	12,69	12,28	11,42	10,54	11,46	11,91	10,79	11,04	10,63
Magetan	11,35	11,03	10,48	10,31	9,61	10,35	10,66	9,84	9,8	9,32
Ngawi	15,61	15,27	14,91	14,83	14,39	15,44	15,57	14,15	14,4	13,81
Bojonegoro	15,71	14,6	14,34	13,16	12,38	12,87	13,27	12,21	12,18	11,69
Tuban	17,08	17,14	16,87	15,31	14,58	15,91	16,31	15,02	14,91	14,36
Lamongan	15,38	14,89	14,42	13,8	13,21	13,85	13,86	12,53	12,42	12,16
Gresik	13,63	13,19	12,8	11,89	11,35	12,4	12,42	11,06	10,96	10,32
Bangkalan	22,57	21,41	21,32	19,59	18,9	20,56	21,57	19,44	19,35	18,66
Sampang	25,69	24,11	23,56	21,21	20,71	22,78	23,76	21,61	21,76	20,83
Pamekasan	17,41	16,7	16	14,47	13,95	14,6	15,3	13,93	13,85	13,41
Sumenep	20,2	20,09	19,62	20,16	19,48	20,18	20,51	18,76	18,7	17,78
Kota Kediri	8,51	8,4	8,49	7,68	7,16	7,69	7,75	7,23	7,15	6,51
Kota Blitar	7,29	7,18	8,03	7,44	7,13	7,78	7,89	7,37	7,3	6,75
Kota Malang	4,6	4,33	4,17	4,1	4,07	4,44	4,62	4,37	4,26	3,91
Kota Probolinggo	8,17	7,97	7,84	7,2	6,91	7,43	7,44	6,65	6,48	6,18
Kota Pasuruan	7,47	7,62	7,53	6,77	6,46	6,66	6,88	6,37	6,6	6,32
Kota Mojokerto	6,16	5,73	5,73	5,5	5,15	6,24	6,39	5,98	5,77	5,57

Kabupaten/Kota	Jawa Timur Tahun 2015-2024 (Persen)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Madiun	4,89	5,16	4,94	4,49	4,35	4,98	5,09	4,76	4,74	4,38
Kota Surabaya	5,82	5,63	5,39	4,88	4,51	5,02	5,23	4,72	4,65	3,96
Kota Batu	4,71	4,48	4,31	3,89	3,81	3,89	4,09	3,79	3,31	3,06
Jawa Timur	12.34	12.05	11.77	10.98	10.37	11.09	11.4	10.38	10.35	9.79

Sumber: *BPS (2023) Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur*

Dari Tahun 2015-2024(Data Diolah)

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Tabel 2, terlihat bahwa sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mempunyai tingkat kemiskinan relatif tinggi dengan rata-rata provinsi. Daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Sampang, Sumenep, Bangkalan, Probolinggo, Tuban, Ngawi, Pamekasan, Pacitan, Bondowoso, Lamongan, Bojonegoro, Gresik, Trenggalek, Nganjuk, Madiun, Kediri, Situbondo. Jika ditinjau dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagian besar wilayah tersebut merupakan daerah yang mengandalkan sektor pertanian serta terletak di kawasan pesisir.

Menurut Kuncoro (2006) dalam Devanantyo (2021), kemiskinan timbul akibat sejumlah faktor. Pertama, ketimpangan pendapatan yang berasal dari perbedaan kepemilikan. Kedua, sumber daya manusia rendah dipengaruhi tingkat pendidikan belum memadai. Ketiga, keterbatasan akses dan minimnya kepemilikan modal. Jumlah dan mutu sumber daya manusia memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Jumlah penduduk dapat merepresentasikan kuantitas sumber daya manusia. Ketimpangan tingkat kemiskinan antar wilayah di Jawa Timur menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum tersalurkan secara merata. Selain itu, terdapat disparitas dalam standar kebutuhan hidup minimum di masing-masing wilayah, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis serta ketimpangan aktivitas ekonomi akibat perbedaan dalam

Kualitas sarana dan sistem pendukung, baik yang tampak secara fisik maupun yang bersifat administratif atau kelembagaan.

Penelitian bertujuan mengkaji sejauh mana Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Ketimpangan Pendapatan berdampak pada tingkat kemiskinan. Meskipun topik telah banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, namun tetap relevan untuk diteliti mengingat isu kemiskinan masih menjadi perhatian utama, terutama karena dampaknya yang dapat memperburuk tingkat pengangguran dari tahun ke tahun.

Penetapan 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dilandasi oleh tingginya angka kemiskinan di daerah-daerah tersebut, mempunyai karakteristik sosial dan ekonomi berbeda. Oleh karena itu, penulis berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan secara menyeluruh variabel independen berupa Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Ketimpangan Pendapatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diketahui bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai peran pada tingkat kemiskinan. Untuk menjawab permasalahan, maka sebuah kajian ilmiah mengusung judul: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2023 (Studi Kasus pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur)”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah pokok pada penelitian yang menjadi dasar dalam penyusunan analisis dan pembahasan lebih lanjut. Rumusan masalah ini disusun untuk mengarahkan fokus penelitian terhadap isu-isu utama berkaitan pada variabel yang diteliti serta untuk memperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi fenomena yang dikaji.

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur?
4. Apakah variabel independent berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan manusia terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui apakah variabel independent berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen?

Adapun manfaat hendak dicapai pada penelitian sebagai berikut:

1. **Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terutama dalam mendukung pengembangan kajian ilmiah di bidang ekonomi pembangunan dan permasalahan sosial. Hasil analisis mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia,

dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dapat dijadikan acuan bagi sivitas akademika dalam menyusun penelitian lanjutan maupun tugas akhir. Selain itu, temuan dari studi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam merancang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis bukti empiris, serta mendorong peningkatan kualitas publikasi ilmiah yang memperkuat posisi universitas sebagai lembaga yang berkontribusi aktif dalam penyelesaian isu-isu pembangunan daerah.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian mampu memberikan manfaat untuk bahan rujukan dalam proses belajar dan peningkatan pengetahuan, khususnya dalam menganalisis berbagai faktor berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian menjadi sumber informasi untuk pembaca serta referensi yang bermanfaat perumusan kebijakan yang tepat. Selain itu mampu dijadikan acuan dan pertimbangan dalam pelaksanaan studi-studi lanjutan yang sejenis, guna mendukung upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.